

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - 2015

PERDA KAB KUTAI TIMUR NO.2, LD. 2015/NO. 2.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

ABSTRAK : - Dalam rangka menciptakan ketertiban, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan fungsi pelayanan umum pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan Peraturan Perundang-undangan pengelolaan keuangan yang mengikat seluruh pejabat atau pihak terkait dalam pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu dibentuk Perda.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
 1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung;
 3. Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran.

CATATAN : - Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan Bupati Kutai Timur melalui Perbup.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Januari 2015.